



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LALU WIRANATA
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR, TATA RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
3. NHK : 516888

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 165 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 200.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU XENIA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 110.500.000

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 61.352.100

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.121.852.100

III. HUTANG Rp. 170.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 951.852.100

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.